



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN
2024



ditjenperkeretaapian



@ditjenperkeretaapian



djka.dephub.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta,

Januari 2024

Menyaksikan :

Direktur Jenderal Perkeretaapian

Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM.
NIP 196706081990031005

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T.
NIP 196507031991032001

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

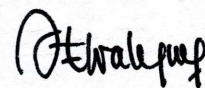
Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, Profil dan Peta Risiko, serta Rencana Penanganan Risiko.
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh Pengelola Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Rencana Penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
4. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan monitoring dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, termasuk melakukan komunikasi dan konsultasi yang diperlukan dengan lini kedua dan ketiga.

Jakarta, Januari 2024

Ditetapkan oleh

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.

KATA PENGANTAR

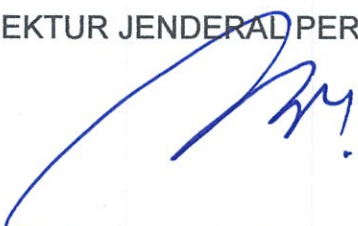
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penetapan terhadap target kinerja yang merupakan suatu kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian periode sebelumnya serta sumber daya yang ada diantaranya anggaran pada Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian dengan mewujudkan sistem Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	1
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	3
	1.5. Sumber Daya Manusia	3
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024	5
	2.1. Tujuan	5
	2.2. Sasaran	5
	2.3. Arah Kebijakan dan Strategi	6
	2.4. Indikator Kinerja Kegiatan	7
	2.5. Program dan Kegiatan	15
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2024	16
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	16
	3.2. Target Perjanjian Kinerja	18
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024	20
BAB 4	: PENUTUP	22

LAMPIRAN A : Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

LAMPIRAN B : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN C : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun berdasarkan indikator kinerja (*performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja, target kinerja serta alokasi anggaran dan rencana aksi. Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian periode sebelumnya serta beberapa aspek sumber daya antara lain pembiayaan/anggaran, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai wujud komitmen antara pemberi amanah (Direktur Jenderal Perkeretaapian) dan penerima amanah (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan menetapkan target pencapaian terhadap sasaran dari program dan kegiatan berdasarkan kebijakan prioritas dan sumber daya yang tersedia pada Tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan pada program infrastruktur konektivitas dan dukungan manajemen melalui ukuran indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan guna selanjutnya sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi,

kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum serta dibantu dengan beberapa kelompok fungsional tertentu/ koordinator.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian posisi per-Januari Tahun 2024 sebanyak 129 orang, dengan uraian komposisi sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

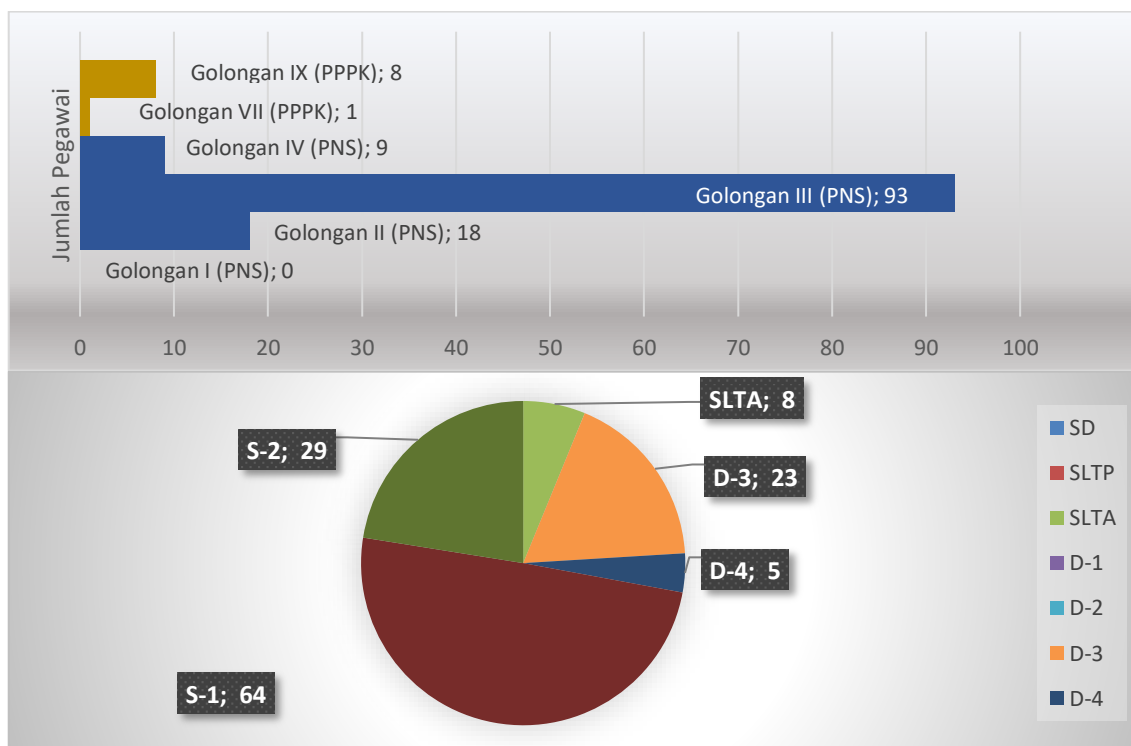
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan	28
2	Bagian Keuangan	34
3	Bagian Hukum	26
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	41
Jumlah		129

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan I	0
2	PNS Golongan II	18
3	PNS Golongan III	93
4	PNS Golongan IV	9
5	PPPK Golongan VIII	1
6	PPPK Golongan IX	8
Jumlah		129

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	8
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	23
7	D-4	5
8	S-1	64
9	S-2	29
10	S-3	0
Jumlah		129



Gambar 1-2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Pendidikan

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

2.1 TUJUAN

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024, visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

1. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif;
2. Mewujudkan birokrasi yang *Good Governance* dan *Clean Governance*;
3. Mewujudkan SDM regulator yang kompeten dan profesional;
4. Merumuskan regulasi perkeretaapian yang responsif dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan sistem informasi perkeretaapian.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan tujuan yaitu:

1. Penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
2. Pengelolaan birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien;
3. Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan;
4. Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan.

2.2 SASARAN

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 termasuk *cascading* sasaran program, sasaran kegiatan untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian;

2. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
3. Tersedianya SDM perkeretaapian yang kompeten dan profesional;
4. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan mendukung pengembangan konektivitas perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan survey/studi kebijakan/*masterplan*/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;
2. Melaksanakan penyusunan legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat keahlian tertentu;
4. Melaksanakan pengembangan/pengelolaan sistem informasi berbasis IT dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian;
5. Melaksanakan publikasi penyelenggaraan perkeretaapian dalam rangka membangun dan mempertahankan sebuah reputasi citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat;
6. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, RKA, Perjanjian Kinerja, lainnya) serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (LKIP);
7. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran termasuk optimalisasi dan efisiensi penyerapan anggaran;
8. Melaksanakan monitoring perolehan PNPB bidang perkeretaapian;
9. Melaksanakan implementasi pengendalian *intern* dan manajemen risiko termasuk meningkatkan Tingkat Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

10. Melaksanakan kegiatan layanan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian, layanan internal dan layanan perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

2.4 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tolak ukur keberhasilan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	Dokumen	-	4	5	5	6
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20	40	60	80	100
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%	25	35	45	55	65
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian	%	35	50	65	80	100
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	85	86	87	88	90
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	4
	h.	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	727 Milyar	841 Milyar	925 Milyar	1.018 Milyar	1.120 Milyar

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	i.	Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91	93	95	97	97
	j.	Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran	%	100	100	100	100	100

Pada Tahun 2021 dan 2023, telah dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dengan tetap mengacu *cascading* sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Reviu terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mengacu pada hal tersebut, diperoleh Indikator Kinerja Kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 2-2 IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean</i>	Indeks RB Ditjen Perkeretaapian	Indeks
		Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
	Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 2-3 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART					
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)		ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur pemanfaatan/tindak lanjut dari penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$		Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program konektivitas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase pencapaian target legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2020-2024	Jumlah capaian legislasi periode Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$		Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	Merupakan parameter untuk mengukur kondisi SDM/ASN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian mendukung fungsi regulator penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan Sistem Informasi dan Teknologi yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Rencana Induk	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur pemenuhan informasi publik kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan). $\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan Nilai Tingkat/Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/BPKP (Level 1-5)	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Rupiah) sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik; • 80% - 90%: Kategori Baik; • 60% - 80%: Kategori Cukup; • 50% - 60%: Kategori Kurang; • Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala <i>likert</i> 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pada Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi dengan tolak ukur indikator kinerja unit kerja. Secara rinci uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, dengan kegiatan mencakup:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan mencakup:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dokumen Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2020: Rp. 117.077.827.000;
2. Tahun 2021: Rp. 223.261.498.108;
3. Tahun 2022: Rp. 245.587.647.919;
4. Tahun 2023: Rp. 270.146.412.711;
5. Tahun 2024: Rp. 297.161.053.982.

BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja kegiatan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun tata cara pengukuran indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}} \times 100\%$
2	Persentase Pencapaian Target Legalisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah capaian legislasi periode tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pencapaian Target Legalisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian.

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
			$\frac{\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\frac{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian}}} \times 100\%$
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}}} \times 100\%$
5	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan). $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}}} \times 100\%$
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK yang nilainya dapat diperoleh pada Aplikasi SMART/Monev Kementerian Keuangan untuk Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
10	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala <i>likert</i> 1-5) diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan terkait kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Target Perjanjian Kinerja ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis, capaian periode/tahun sebelumnya dan perkembangan kebijakan, program/kegiatan serta sumber daya yang tersedia pada Tahun 2024. Untuk target Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 diuraikan pada Tabel berikut:

**Tabel 3-2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Capaian				Target Renstra	Target PK 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023 (Indikasi)			
IKK1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas yang telah Ditindaklanjuti	%	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	Kegiatan pendukung Tahun 2024 terdiri dari 3 kegiatan (2 Kajian Rekomendasi Kebijakan dan 1 Kajian Kemanfaatan)
IKK2 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian)	%	31,11	48,89	62,22	97,78	100,00	100,00	Penyusunan/ penyempurnaan peraturan perundangan bidang perkeretaapian pada Tahun 2024 dengan tambahan penyelesaian 1 peraturan perundangan
IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian	%	29,19	55,05	39,64	55,79	65,00	65,00	Sertifikat keahlian teknis/manajerial untuk SDM Ditjen Perkeretaapian termasuk fungsional tertentu dibandingkan jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian
IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	37,04	37,04	59,26	70,37	100,00	77,00	Acuan <i>Roadmap</i> Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan penambahan 2 sistem TIK pada Tahun 2024
IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	104,95	108,93	127,10	100,64	100,00	100,00	Pameran, Penerbitan <i>News Letter</i> Ditjen Perkeretaapian, Penyusunan Publikasi Program Perkeretaapian Melalui layanan Media Sosial dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
IKK6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	81,92	82,15	80,42	82,70	90,00	83,00	Target mempertimbangkan realisasi Tahun 2023
IKK7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	4	3	Penilaian mandiri dengan penjaminan kualitas dari APIP dan evaluasi oleh BPKP
IKK8 Persentase Realisasi PNPB Bidang Perkeretaapian	%	-	54,18	31,52	63,79	-	100,00	Target PNPB Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar Rp1,26 triliun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Capaian				Target Renstra	Target PK 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023 (Indikasi)			
IKK9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	-	98,03	98,54	88,81	97,00	89,00	Target kinerja mempertimbangkan realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Tahun 2023
IKK10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,69	-	3,70	Hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan terkait kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian

3.3 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024

Alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian pada Tahun 2024 mencakup:

Tabel 3-3 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	10.189.312.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi KA	7.739.451.000
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	154.754.309.000
4.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	3.923.109.000
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	11.503.441.000
6.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	2.595.419.000
Jumlah		190.705.041.000

Tabel 3-4 Rincian Anggaran Per-Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas	a.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	100%	7.166.891.000
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase Pencapaian Target Legalisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	100%	6.255.254.000
Tersedianya SDM perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	65%	11.117.036.000
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	77%	3.923.109.000
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	100%	11.503.441.000
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	83	16.552.633.000
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level 3	4.481.979.000
	h.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	100%	6.270.812.000
	i.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	89%	7.959.221.000
	j.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,70	115.474.665.000
Jumlah				190.705.041.000

BAB 4 PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 meliputi Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas perkeretaapian yang merupakan program utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Perjanjian Kinerja telah menetapkan target masing-masing indikator kinerja kegiatan dan selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mewujudkan sistem Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%	65,00
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	77,00
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas

Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian
- b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
- c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian
- d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian
- e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp.	10.189.312.000
Rp.	10.189.312.000
Rp.	180.515.729.000
Rp.	7.739.451.000
Rp.	154.754.309.000
Rp.	3.923.109.000
Rp.	11.503.441.000
Rp.	2.595.419.000
Rp.	190.705.041.000

Disetujui
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian													7.166.891.000	Kabag Perencanaan
IKK 1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti (%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	7.166.891.000	Kabag Perencanaan
1)	Penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	7.166.891.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	78%	96%	100%	100%	100%	100%		
SK 2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian													6.255.254.000	Kabag Hukum
IKK 2	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) (%)	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	100%	100%	100%	100%	6.255.254.000	Kabag Hukum
1)	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.822.420.000	Kabag Hukum
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%		
2)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.454.808.000	Kabag Hukum
		290.961.600	436.442.400	509.182.800	581.923.200	727.404.000	872.884.800	1.018.365.600	1.163.846.400	1.236.586.800	1.309.327.200	1.454.808.000	100%		
3)	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.330.000	Kabag Hukum
		56.066.000	84.099.000	98.115.500	112.132.000	140.165.000	168.198.000	196.231.000	224.264.000	238.280.500	252.297.000	280.330.000	100%		
4)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.382.000	Kabag Hukum
		82.476.400	123.714.600	144.333.700	164.952.800	206.191.000	247.429.200	288.667.400	329.905.600	350.524.700	371.143.800	412.382.000	100%		
5)	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.899.000	Kabag Hukum
		89.579.800	134.369.700	156.764.650	179.159.600	223.949.500	268.739.400	313.529.300	358.319.200	380.714.150	403.109.100	447.899.000	100%		
6)	Pengelolaan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.837.415.000	Kabag Hukum
		11.483.274	87.559.802	103.673.206	118.268.903	141.441.031	1.010.578.250	1.194.319.750	1.378.061.250	1.469.932.000	1.653.673.500	1.837.415.000	100%		
SK 3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional													11.117.036.000	Kabag SDM dan Umum
IKK 3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (%)	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	65%	11.117.036.000	Kabag SDM dan Umum
1)	(Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.001.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
2)	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsisparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.418.000	Kabag SDM dan Umum
		2.077.509	15.840.980	18.756.155	21.396.751	25.588.963	182.829.900	216.071.700	249.313.500	265.934.400	299.176.200	332.418.000	100%		
3)	Pengelolaan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.011.220.000	Kabag SDM dan Umum
		31.318.572	238.803.661	282.750.083	322.557.229	385.755.056	2.756.171.000	3.257.293.000	3.758.415.000	4.008.976.000	4.510.098.000	5.011.220.000	100%		
4)	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.370.000	Kabag SDM dan Umum
		796.023	6.069.664	7.186.649	8.198.426	9.804.722	70.053.500	82.790.500	95.527.500	101.896.000	114.633.000	127.370.000	100%		
5)	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.590.000	Kabag SDM dan Umum
		5.734.653	43.726.648	51.773.550	59.062.521	70.634.492	504.674.500	596.433.500	688.192.500	734.072.000	825.831.000	917.590.000	100%		
6)	Character Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.365.737.000	Kabag SDM dan Umum
		21.034.813	160.390.148	189.906.334	216.642.414	259.088.618	1.851.155.350	2.187.729.050	2.524.302.750	2.692.589.600	3.029.163.300	3.365.737.000	100%		
7)	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.700.000	Kabag SDM dan Umum
		1.016.825	7.753.273	9.180.088	10.472.512	12.524.365	89.485.000	105.755.000	122.025.000	130.160.000	146.430.000	162.700.000	100%		
SK 4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal													3.923.109.000	Kabag Perencanaan
IKK 4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian (%)	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	77%	3.923.109.000	Kabag Perencanaan
1)	Pengelolaan data dan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.223.109.000	Kabag Perencanaan
		244.621.800	366.932.700	428.088.150	489.243.600	611.554.500	733.865.400	856.176.300	978.487.200	1.039.642.650	1.100.798.100	1.223.109.000	100%		
2)	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
3)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%		
SK 5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian													11.503.441.000	Kabag Hukum
IKK 5	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian (%)	5%	15%	25%	30%	40%	50%	55%	65%	75%	80%	90%	100%	11.503.441.000	Kabag Hukum
1)	Pelayanan humas dan protokol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.503.441.000	Kabag Hukum
		64.666.750	493.083.036	583.823.836	666.017.836	796.509.036	6.326.892.550	7.477.236.650	8.627.580.750	9.202.752.800	10.353.096.900	11.503.441.000	100%		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 6	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian													150.739.310.000	Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag Hukum, Kabag SDM dan Umum
IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	16.552.633.000	Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag SDM dan Umum
1)	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	349.120.380 6,68%	1.191.608.484 22,80%	1.607.103.548 30,75%	1.874.170.186 35,86%	2.081.656.400 39,83%	2.270.327.743 43,44%	2.749.061.678 65,40%	3.418.034.862 70,99%	3.710.187.995 72,99%	4.264.704.048 81,60%	4.480.552.427 85,73%	5.226.353.000 100,00%	5.226.353.000	Kabag Perencanaan
2)	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	173.627.610 10,48%	183.733.797 11,09%	346.095.493 20,89%	386.851.592 23,35%	572.573.491 34,56%	750.342.981 45,29%	904.586.592 54,60%	1.057.339.126 63,82%	1.148.294.811 69,31%	1.325.401.600 80,00%	1.656.752.000 100,00%	1.656.752.000	Kabag Perencanaan
3)	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	177.676.361 22,36%	439.979.433 55,37%	439.979.433 55,37%	439.979.433 55,37%	449.196.990 56,53%	449.196.990 56,53%	449.196.990 56,53%	624.568.962 78,60%	657.148.259 82,70%	657.148.259 82,70%	794.617.000 100,00%	794.617.000	Kabag Perencanaan
4)	Penyajian Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	-	51.602.400 10%	103.204.800 20%	154.807.200 30%	206.409.600 40%	258.012.000 50%	309.614.400 60%	361.216.800 70%	412.819.200 80%	464.421.600 90%	516.024.000 100%	516.024.000	Kabag Perencanaan
5)	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	-	166.750.669 12%	248.012.645 18%	325.320.602 24%	467.392.717 34%	467.392.717 34%	531.747.840 39%	531.747.840 39%	795.167.539 58%	871.248.384 64%	1.330.187.674 98%	1.363.456.000 100%	1.363.456.000	Kabag Perencanaan
6)	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	26.189.201 3%	101.327.265 10%	120.137.762 12%	128.867.496 12%	136.350.125 13%	278.935.774 27%	444.488.936 43%	486.786.574 47%	665.850.038 64%	935.328.600 90%	1.039.254.000 100%	1.039.254.000	Kabag Perencanaan
7)	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendalian Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	43.207.200 3%	43.207.200 3%	150.870.700 9%	150.870.700 9%	280.247.700 16%	860.151.000 50%	1.032.181.200 60%	1.204.211.400 70%	1.376.241.600 80%	1.548.271.800 90%	1.720.302.000 100%	1.720.302.000	Kabag Perencanaan
8)	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	43.207.200 4%	43.207.200 4%	150.870.700 14%	150.870.700 14%	280.247.700 14%	534.383.500 26%	641.260.200 30%	748.136.900 35%	855.013.600 40%	961.890.300 48%	1.068.767.000 52%	1.068.767.000	Kabag Perencanaan
9)	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNB, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggala)	-	-	-	450.016.200 15%	450.016.200 15%	1.650.059.400 55%	1.650.059.400 55%	2.550.091.800 85%	3.000.108.000 100%	3.000.108.000 100%	3.000.108.000 100%	3.000.108.000 100%	3.000.108.000	Kabag Keuangan
10)	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	-	-	-	25.050.000 15%	25.050.000 15%	91.850.000 55%	91.850.000 55%	141.950.000 85%	167.000.000 100%	167.000.000 100%	167.000.000 100%	167.000.000 100%	167.000.000	Kabag SDM dan Umum
IKK 7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.481.979.000	Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag SDM dan Umum
1)	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	15.150.000 1%	72.150.000 6%	120.549.600 10%	120.549.600 10%	120.549.600 10%	361.648.800 30%	482.198.400 40%	602.748.000 50%	723.297.600 60%	964.396.800 80%	1.205.496.000 100%	1.205.496.000	Kabag Keuangan
2)	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1.107.226 1%	8.442.585 5%	9.996.252 6%	11.403.581 6%	13.637.856 8%	97.440.750 55%	115.157.250 65%	132.873.750 75%	141.732.000 80%	159.448.500 90%	177.165.000 100%	177.165.000	Kabag SDM dan Umum
3)	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1.142.887 1%	8.714.498 5%	10.318.204 6%	11.770.859 6%	14.077.094 8%	100.579.050 55%	118.866.150 65%	137.153.250 75%	146.296.800 80%	164.583.900 90%	182.871.000 100%	182.871.000	Kabag SDM dan Umum
4)	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	-	15.917.073 1%	121.367.454 5%	143.702.394 6%	163.933.625 6%	196.052.728 8%	1.400.771.900 55%	1.655.457.700 65%	1.910.143.500 75%	2.037.486.400 80%	2.292.172.200 90%	2.546.858.000 100%	2.546.858.000	Kabag Perencanaan
5)	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	2.309.817 1%	17.612.319 5%	20.853.469 6%	23.789.337 6%	28.450.323 8%	203.273.950 55%	240.232.850 65%	277.191.750 75%	295.671.200 80%	332.630.100 90%	369.589.000 100%	369.589.000	Kabag Keuangan
IKK 8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang Perkeretaapian (%)	1	1	3	4	5	10	15	20	41	45	50	100	6.270.812.000	Kabag Keuangan
1)	Pengulan PNB Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNB Ditjen Perkeretaapian	-	162.213.400 20%	243.320.100 30%	324.426.800 40%	364.980.150 45%	405.533.500 50%	446.086.850 55%	486.640.200 60%	567.746.900 70%	648.853.600 80%	729.960.300 90%	811.067.000 100%	811.067.000	Kabag Keuangan
2)	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	53.520.300 10%	267.601.500 50%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000 100%	535.203.000	Kabag Keuangan
3)	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	50.485.800 20%	75.728.700 30%	100.971.600 40%	113.593.050 45%	126.214.500 50%	138.835.950 55%	151.457.400 60%	176.700.300 70%	201.943.200 80%	227.186.100 90%	252.429.000 100%	252.429.000	Kabag Keuangan
4)	Permutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	87.669.000 10%	131.503.500 20%	175.338.000 30%	197.255.250 45%	219.172.500 50%	241.089.750 55%	263.007.000 60%	306.841.500 70%	350.676.000 80%	394.510.500 90%	438.345.000 100%	438.345.000	Kabag Keuangan
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	25.822.337 1%	196.894.950 5%	233.129.020 6%	265.950.233 7%	318.057.193 8%	2.198.212.500 55%	2.587.887.500 65%	2.997.562.500 75%	3.197.400.000 80%	3.597.075.000 90%	3.996.750.000 100%	3.996.750.000	Kabag Keuangan
6)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1.531.334 1%	11.676.399 5%	13.825.176 6%	15.771.562 7%	18.861.645 8%	130.359.900 55%	154.061.700 65%	177.763.500 75%	189.614.400 80%	213.316.200 90%	237.018.000 100%	237.018.000	Kabag Keuangan
IKK 9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian (%)	19,24	22,3	26,74	31,47	36,31	40,68	44,57	50,31	56,3	69	75	89	7.959.221.000	Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag Hukum, Kabag SDM dan Umum
1)	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	37.517.940 1%	56.276.910 3%	75.035.880 4%	93.794.850 5%	112.553.820 6%	750.358.800 40%	937.948.500 50%	1.125.538.200 60%	1.313.127.900 70%	1.500.717.600 80%	1.875.897.000 100%	1.875.897.000	Kabag Keuangan
2)	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelengkapan	-	90.591.840 8%	135.887.760 16%	181.183.680 24%	226.479.600 32%	271.775.520 40%	317.071.440 48%	362.387.360 56%	407.663.280 72%	452.959.200 80%	498.255.120 88%	566.199.000 100%	566.199.000	Kabag SDM dan Umum
3)	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	192.384.000 8%	288.576.000 16%	384.768.000 32%	480.960.000 40%	577.152.000 48%	673.344.000 56%	769.536.000 64%	865.728.000 72%	961.920.000 80%	1.058.112.000 88%	1.202.400.000 100%	1.202.400.000	Kabag Keuangan
4)	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	168.907.360 8%	253.361.040 16%	337.814.720 24%	422.268.400 32%	506.722.080 40%	591.175.760 56%	675.629.440 64%	760.083.120 72%	844.536.800 80%	928.990.480 88%	1.055.671.000 100%	1.055.671.000	Kabag Perencanaan
5)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	136.797.600 8%	205.196.400 16%	273.595.200 24%	341.994.000 32%	410.392.800 40%	478.791.600 56%	547.190.400 64%	615.589.200 72%	683.988.000 80%	752.386.800 88%	854.985.000 100%	854.985.000	Kabag Hukum
6)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	259.055.200 8%	388.582.800 16%	518.110.400 24%	647.638.000 32%	777.165.600 40%	906.693.200 48%	1.036.220.800 56%	1.165.748.400 64%	1.295.276.000 72%	1.424.803.600 80%	1.619.095.000 100%	1.619.095.000	Kabag Keuangan

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IKK 10	7) Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	82.787.820 8%	125.595.840 10%	188.393.780 24%	251.191.880 32%	313.989.000 40%	376.787.520 48%	439.585.440 50%	502.383.360 64%	565.181.280 72%	627.979.200 80%	690.777.120 88%	754.974.000 100%	784.974.000	Kabag Keuangan
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	115.474.865.000	Kabag SDM dan Umum
1)	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	101.620.200 20%	152.439.300 30%	177.845.850 35%	203.262.400 40%	264.085.500 50%	304.678.600 60%	355.691.700 70%	406.504.800 80%	431.911.350 85%	457.317.350 90%	508.131.000 100%	508.131.000	Kabag SDM dan Umum
	Pengelolaan Anasp	-	111.487.000 31%	181.426.000 50%	223.808.039 62%	223.808.039 62%	243.708.039 68%	180.314.600 50%	216.377.400 60%	232.440.300 70%	286.593.200 80%	324.668.100 90%	360.629.000 100%	360.629.000	Kabag SDM dan Umum
3)	Monitoring Ketatausahaan	-	282.832.100 89%	1.558.948.181 529%	1.912.936.478 645%	5.039.589.887 1708%	5.354.071.537 1816%	132.775.200 45%	147.528.000 50%	177.033.600 60%	208.539.200 70%	238.044.800 80%	285.058.000 100%	295.058.000	Kabag SDM dan Umum
	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	13.239.450 9%	28.478.900 10%	39.718.350 15%	66.197.250 25%	496.497.352 187%	119.158.090 45%	158.873.400 60%	172.112.850 65%	195.352.300 70%	211.831.200 80%	238.310.100 90%	264.789.000 100%	264.789.000	Kabag SDM dan Umum
5)	Inventarisasi anasp statis dan anasp terjaga di lingkungan DJKA	7.505.100 5%	15.010.200 10%	22.515.300 15%	37.525.500 20%	496.497.352 330%	87.545.900 45%	80.081.200 50%	97.588.300 65%	106.071.400 70%	120.081.600 80%	135.081.800 90%	150.102.000 100%	150.102.000	Kabag SDM dan Umum
	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	23.708.750 5%	47.413.500 10%	71.120.250 15%	118.533.750 25%	496.497.352 105%	213.360.750 45%	284.481.000 60%	308.187.750 85%	331.894.500 70%	379.308.000 80%	428.721.500 90%	474.135.000 100%	474.135.000	Kabag SDM dan Umum
7)	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	3.783.810 1%	7.567.620 2%	11.351.430 3%	15.135.240 4%	18.919.050 5%	22.702.860 6%	151.332.400 40%	189.190.500 50%	227.028.600 60%	284.868.700 70%	302.704.800 80%	378.381.000 100%	378.381.000	Kabag SDM dan Umum
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	5.783.770 1%	11.567.540 2%	17.351.310 3%	23.015.080 4%	28.768.850 5%	34.522.620 6%	230.150.800 40%	287.688.500 50%	345.226.200 60%	402.763.900 70%	460.301.600 80%	575.377.000 100%	575.377.000	Kabag SDM dan Umum
9)	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	4.258.070 1%	8.516.140 2%	12.774.210 3%	17.020.280 4%	21.276.350 5%	25.530.420 6%	170.202.800 40%	212.763.500 50%	235.304.400 60%	257.854.900 70%	340.405.800 80%	425.507.000 100%	425.507.000	Kabag SDM dan Umum
	Penyediaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	18.405.120 8%	32.930.240 15%	48.395.360 24%	63.860.480 32%	82.325.600 40%	98.780.720 48%	115.235.840 56%	131.720.960 64%	148.186.080 72%	164.651.200 80%	181.116.320 88%	205.614.000 100%	205.614.000	Kabag SDM dan Umum
12)	Kendaraan Bermotor	1.378.497.150 35%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000 100%	3.932.849.000	Kabag SDM dan Umum
	Renovasi gedung dan bangunan	-	2.078.933.250 15%	2.078.933.250 15%	2.078.933.250 15%	2.078.933.250 15%	5.535.822.000 40%	5.535.822.000 40%	5.535.822.000 40%	10.379.098.250 75%	10.379.098.250 75%	10.379.098.250 75%	13.839.555.000 100%	13.839.555.000	Kabag SDM dan Umum
14)	Gaji dan Tunjangan	5.308.473.840 8%	10.618.947.680 18%	15.928.421.520 24%	21.237.895.360 32%	26.547.389.200 40%	31.856.843.040 48%	37.166.318.880 56%	42.475.792.720 64%	47.785.264.560 72%	53.094.738.400 80%	58.404.212.240 88%	66.368.423.000 100%	66.368.423.000	Kabag SDM dan Umum
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.187.885.780 8%	4.375.771.520 18%	6.563.657.280 24%	8.750.543.040 32%	10.938.428.800 40%	13.126.314.560 48%	15.314.200.320 56%	17.501.486.080 64%	19.689.171.840 72%	21.876.857.600 80%	24.064.543.360 88%	27.346.072.000 100%	27.346.072.000	Kabag SDM dan Umum
														190.705.041.000	

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JUJI ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001